
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

EFFECT OF REGIONAL TAX, REGIONAL RETRIBUTION, GENERAL ALLOCATION FUNDS AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON LOCAL GOVERNMENT CAPITAL GOODS IN CENTRAL JAVA AND REGIONAL REGION IN YOGYAKARTA IN 2016

Retno Sri Widyastuti
retnoiek789@gmail.com

STIE Adi Unggul Bhirawa (AUB) Surakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh yang pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah se-Jateng dan DIY tahun 2016. Sampel yang dipilih untuk menjadi obyek penelitian ini adalah pemerintah daerah se-Jateng dan DIY tahun 2016 sejumlah 40 kota/kabupaten. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sensus* yaitu mengambil seluruh jumlah populasi yang ada. Metode analisis dalam penelitian ini terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji R^2 . Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai distribusi normal, terbebas dari multikolinieritas, tidak mengandung adanya heterokedastisitas dan tidak terdapat autokorelasi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY, Retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY, dan DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY. Hasil uji R^2 (koefisien determinasi) diketahui bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK mampu menjelaskan sebesar 52,7 % terhadap variabel Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY, sedangkan sisanya sebesar 47,3 % dijelaskan oleh variabel lain seperti pendapatan lain-lain, dana hasil bukan pajak, dan dana hasil pajak.

Kata kunci : belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK

Abstract

The purpose of this study is to analyze and provide empirical evidence of the effect that local taxes, levies, DAU, and DAK on regional government capital spending in Central Java and Yogyakarta. The population of this study is the regional government of Central Java and Yogyakarta in 2016. The sample chosen to be the object of this study is the regional government of Central Java and Yogyakarta in 2016 a number of 40 cities / districts. The sampling technique in this study is the census that takes the entire number of existing population. The method of analysis in this study consisted of classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, and R^2 test. The results of the classical assumption test show that all variables have a normal distribution, free from multicollinearity, does not contain any heterokedastisitas and there is no autocorrelation. The results of hypothesis testing show that local taxes have a positive and significant impact on regional government capital spending in Central Java and Yogyakarta, Levy area has a positive but not significant impact on regional government capital expenditure in Central Java and Yogyakarta, DAU has a positive and significant impact on regional government capital spending in Central Java and DIY, and DAK have positive but not significant influence to regional government capital expenditure in Central Java and Yogyakarta. Result of test of R^2 (coefficient of determination) is known that local tax, regional retribution, DAU, and DAK able to explain equal to 52,7% to variable of Local Government capital expenditure in Central Java and DIY, while the rest equal to 47,3% explained by other variable like income others, non-tax proceeds, and tax-deductible funds.

Keywords: capital expenditure, regional tax, regional retribution, DAU, and DAK

A. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13/2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59/2007 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan baru ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Kawedar dkk (2008:2) berpendapat bahwa Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Kawedar dkk, 2008:2)

Berdasarkan pengamatan sementara menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi daerah, jika retribusi daerah meningkat, maka pendapatan juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan,

peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Perubahan alokasi belanja modal ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dilakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016**".

B. Perumusan Masalah

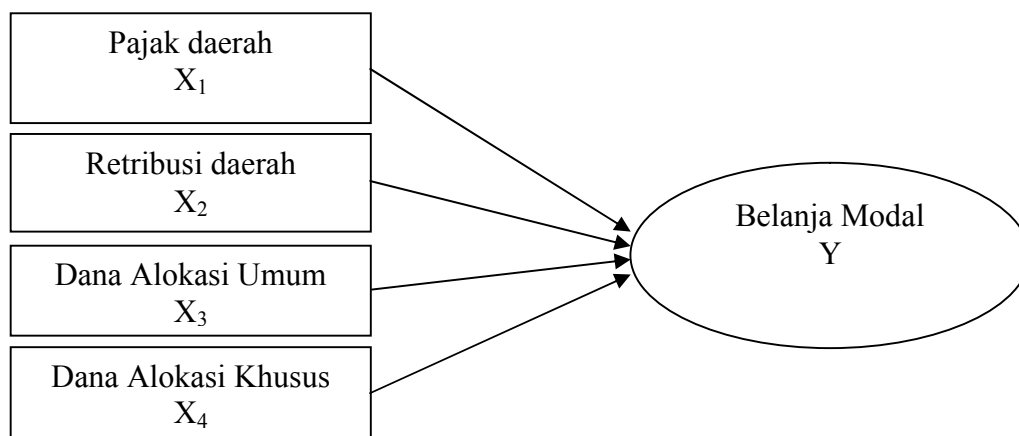
Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY?

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut pada gambar 1 :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Hendaris dan Rahayu (2012), Wahyudi (2015), Hasnur (2016) dan Noveandra (2017)

D. Hipotesis

Sesuai dengan landasan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis alternatif dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk Belanja Modal. Penelitian dari Hendaris, dan Rahayu (2012), Hasnur (2016) dan Noveandra (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan argumen tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY

2. Pengaruh Retribusi daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan

dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian dari Wahyudi (2015) dan Hasnur (2016) menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan argumen tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 = Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah di Jateng dan DIY

3. Pengaruh DAU terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan berupa DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan dalam bentuk Belanja Modal. Penelitian dari Hendaris dan Rahayu (2012) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan argumen tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 = Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah di Jateng dan DIY

4. Pengaruh DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal. Penelitian dari Hendaris dan Rahayu (2012) dan Hasnur (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan argumen tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 = Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah di Jateng dan DIY

E. Populasi dan sampel

Menurut Sugiyono (2012:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

penelitian ini adalah laporan keuangan daerah se-Jateng dan DIY tahun 2016 dengan rincian

Pemerintah Daerah di Jateng = 35 kota / kabupaten

Pemerintah Daerah di DIY = 5 kota / kabupaten

Sampel yang dipilih untuk menjadi obyek penelitian ini adalah rekapitulasi laporan realisasi keuangan daerah se-Jateng dan DIY tahun 2016 sejumlah 40 pemda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sensus sampling* yaitu mengambil seluruh jumlah populasi yang ada.

F. Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD

2. Pajak Daerah

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya

disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

4. DAU

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Halim (2004), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

5. DAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

G. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sumber datanya diperoleh dari Jateng dan DIY.

H. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka yaitu suatu cara untuk memperoleh data literatur – literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

I. Metode Analisis Data

- Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya normalitas data, gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinieritas, dan gejala autokorelasi. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa bahwa data telah memenuhi uji asumsi klasik
- Pengujian hipotesa yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi linear berganda, uji t, uji F serta uji R^2 .

J. Hasil Analisa Data Dan Pembahasan

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

- a. Hasil Uji Normalitas
Hasil uji Normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai distribusi normal karena mempunyai nilai Asymp. Sig. (*2-tailed*) sebesar $0,909 > 0,05$.
- b. Hasil Uji Multikolinieritas dikatakan bahwa variabel tersebut terbebas dari multikolinieritas karena nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,10$.
- c. Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi diatas $0,05$ secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai

- absolute residual*, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.
- d. Hasil Uji Autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson (DW)* 2,011 terletak diantara d_L dan d_U atau $1,285 < 2,011 < (4 - 1,721)$ maka

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

- a. Hasil Analisis regresi linier berganda
 Hasil regresi linear berganda disajikan pada tabel 1

Tabel 1
 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31796498567	82781681204		,384	,703
Pajak Daerah	,680	,256	,567	2,656	,012
Retribusi Daerah	,309	2,091	,031	,148	,883
DAU	,240	,084	,334	2,874	,007
DAK	,099	,143	,084	,694	,492

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : data yang diolah, 2018

Dari tabel diatas dapat dirumuskan model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 31796498567 + 0,680 X_1 + 0,309 X_2 + 0,240 X_3 + 0,099 X_4$$

Interprestasi dari persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut :

- a. $\alpha = 31.796.498.567$, artinya bahwa Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY mempunyai nilai positif, apabila Pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK mempunyai nilai konstan.
- b. $\beta_1 = 0,680$ menunjukkan variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY.

- c. $\beta_2 = 0,309$ menunjukkan variabel retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY.
- d. $\beta_3 = 0,240$ menunjukkan variabel DAU berpengaruh positif terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY.
- e. $\beta_4 = 0,099$ menunjukkan variabel DAK berpengaruh positif terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY.
- f. Variabel pajak daerah merupakan variabel dominan dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji t

Tabel 2
 Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31796498567	82781681204		,384	,703
Pajak Daerah	,680	,256	,567	2,656	,012
Retribusi Daerah	,309	2,091	,031	,148	,883
DAU	,240	,084	,334	2,874	,007
DAK	,099	,143	,084	,694	,492

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : data yang diolah, 2018

- Berdasarkan tabel membuktikan bahwa:
- 1) Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016.
 - 2) Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016.
 - 3) AU berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016.

- 4) DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016.

- c. Hasil *Koefisien Determinasi* (R^2)
 Hasil Uji *Koefisien Determinasi* R^2 disajikan pada tabel 3

Tabel 3
 Hasil Uji Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,758 ^a	,575	,527	1,18E+011	2,011

a. Predictors: (Constant), DAK, Retribusi Daerah, DAU, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : data yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai *Adjusted R square* sebesar 0,527, hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK mampu menjelaskan sebesar 52,7 % terhadap variabel Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY, sedangkan sisanya sebesar 47,3 % dijelaskan oleh variabel lain seperti pendapatan lain-lain, dana hasil bukan pajak, dan dana hasil pajak.

K. Pembahasan

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016. Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian Hendaris, dan Rahayu (2012), Hasnur (2016) dan Noveandra (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pajak Daerah dalam semangat kemandirian fiskal harus semakin diberi peranan yang lebih besar dalam pembiayaan pembangunan di daerah yang dalam hal ini terwujud dalam belanja modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah pada provinsi Jawa Tengah dan DIY

sudah mampu menjadikan Pajak daerah sebagai bagian yang terpenting dari Pendapatan Asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah, sehingga kontribusi dan pengaruh pajak sangat berarti dalam PAD. Kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja modal, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, maka akan mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal.

2. Retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016. Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan hasil penelitian Wahyudi (2015) dan Hasnur (2016) menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini agak bertentangan dengan teori ekonomi keuangan daerah yang membahas mengenai APBD yang didasarkan pada semangat Undang-undang otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah pada provinsi Jawa Tengah dan DIY belum mampu menjadikan retribusi daerah sebagai bagian yang terpenting

dari Pendapatan Asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah, sehingga kontribusi dan pengaruh retribusi daerah masih sangat minim.

pemerintah daerah pada provinsi Jawa Tengah dan DIY sangat tergantung dan berharap pada aliran dana transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga retribusi daerah dengan semangat kemadirian fiskal seharusnya semakin diberi peranan yang lebih besar dalam pembiayaan pembangunan di daerah yang dalam hal ini terwujud dalam belanja modal, sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, maka tidak akan mempengaruhi alokasi belanja modal.

3. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016. Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian Hendaris dan Rahayu (2012) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY. Hasil penelitian yang diperoleh mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja modal, sehingga apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Khusus, maka akan mempengaruhi alokasi belanja modal.
4. DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016. Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan hasil penelitian Hendaris dan Rahayu (2012) dan Hasnur (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. Namun pemerintah daerah yang menerima DAK wajib

menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Alasan utama yang menyebabkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal adalah kecilnya Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah di Provinsi Jateng dan DIY. Apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Khusus, maka tidak akan mempengaruhi alokasi belanja modal.

L. Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa:

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY.
2. Retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY
3. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY.
4. DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY.
5. *Koefisien Determinasi*.

Hasil Uji R^2 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R square* bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK mampu menjelaskan sebesar 52,7 % terhadap variabel Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY, sedangkan sisanya sebesar 47,3 % dijelaskan oleh variabel lain seperti pendapatan lain-lain, dana hasil bukan pajak, dan dana hasil pajak.

M. Keterbatasan

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY
2. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasil

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk instansi yang lain.

N. Saran

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016, sarannya meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak yang diberlakukan, antara lain dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, menyederhanakan proses administrasi pajak dan retribusi daerah, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak.
2. Retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016, sarannya kontribusi retribusi daerah sudah baik sehingga harus dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan, dengan cara memperbaiki system pemungutan retribusi daerah serta melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan potensi daerah yang ada agar kontribusi retribusi daerah terhadap investasi daerah semakin besar.
3. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016, sarannya DAU merupakan dana transfer yang penting, transfer dana dari Pemerintah pusat ini merupakan transfer dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke tiap daerah sebagai konsekuensinya tidak

meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi tiap daerah. Tujuan transfer ini sebagai pemerata fiskal tiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan keuangan karena kurangnya potensi daerah itu sendiri. Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengeluarannya daerah guna melaksanakan desentralisasi.

4. DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja modal pemerintah daerah di Jateng dan DIY Tahun 2016, sarannya mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus dengan cara memaksimalkan DAK kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sehingga akan menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam memberikan DAK yang memadai untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
5. Peningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin.
6. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan, serta menambah variabel lagi seperti pendapatan lain-lain, dana hasil bukan pajak, dan dana hasil pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Darwanto dan Yustikasari, Yulia, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsadi Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007

Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi*

Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Hasnur Firman (2016) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Hendaris dan Rahayu (2012) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten/Kotamadya Se- Jawa Barat). *ejournal Universitas Jenderal Achmad Yani* Volume 9 No. 2, Nopember 2012 : 129 – 145

Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008, *Akuntansi Sektor Publik* : Buku 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Nachrowi, D Nachrowi, 2006, *Pendekatan Populer dan Praktis: Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Noveandra Rifqi (2017) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah periode 2012-2014). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Suharyadi dan Purwanto. 2008. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat

Wahyudi Maria Valencia (2015) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 11 (2015)